

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Sukma Sari Dewi Budiarti¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rates* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 24 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan program SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang akuntansi keuangan.

Kata Kunci: GCG, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan *Tax Avoidance*.

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of good corporate governance on tax avoidance as proxied by cash effective tax rates in banking companies listed on the IDX. The independent variable in this study is the proportion of institutional ownership, independent board of commissioners, managerial ownership, audit committee and audit quality. The population of this study are banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2014-2016. The sampling technique used was purposive sampling method, in order to obtain as many as 24 samples. This study uses a descriptive analysis method using the SPSS 23 program. The results show that institutional ownership, independent commissioners, and managerial ownership have no significant effect on tax avoidance. Meanwhile, the audit committee and audit quality have a significant effect on tax avoidance. The results of this study are expected to contribute to the field of financial accounting.

Keywords: GCG, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioner, Audit Quality, and Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk memenuhi semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara, membiayai jaminan kesejahteraan, pelayanan publik, dan penyediaan air, listrik dan lainnya. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara. Untuk memperoleh pendapatan pajak yang maksimal, pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait pembayaran pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak negara adalah dengan mengukung program pengampunan pajak (*tax amnesty*). Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016, amnesti pajak

memiliki pengertian penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Program *Tax amnesty* dicetuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Program tersebut sejak Agustus 2016, menuai hasil positif hingga melampaui pencapaian *tax amnesty* di negara lain.

Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* menurut Brown (2012) ialah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu

yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh individu maupun perusahaan. Peraturan tentang sanksi atas penghindaran pajak tertera pada Undang-undang perpajakan Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, menjelaskan terdapat beberapa kategori pelanggaran bagi pelaku *tax avoidance*, yakni pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Berdasarkan kategori pelanggaran tersebut, penindakan atas pelanggarannya juga berbeda, seperti pendekatan halus (*soft approach*) hingga hukuman pidana.

Aktivitas *tax evasion* dan *tax avoidance* tidak terdeteksi sejak awal, sehingga sulit untuk menghitung kerugian negara akibat pelanggaran pajak. Pentingnya menerapkan *Good Corporate Governance* pada perusahaan untuk menghindari pelanggaran pajak. Menurut Zarkasyi (2008) tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Ketika krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, pemerintah mulai menerapkan konsep GCG di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah memberikan dorongan yang kuat terhadap implementasi GCG di Indonesia, yaitu dengan cara membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dan membuat pedoman GCG di Indonesia. Pada tahun 2000, komitmen GCG juga diberlakukan pada perusahaan sektor swasta non-BUMN melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000.

Penelitian Dewi dan Jati (2014) dan Pohan (2009) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Pranata dkk. (2013) terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan tidak ada pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2013). yang menyebutkan terdapat pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*.

Savitri (2010) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Didukung oleh penelitian Tommi dan Maria (2013) dan Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, Prakosa (2014) menyebutkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini memiliki rumusan apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tujuan penelitian ini

adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Ross dkk. (2012) menyebutkan, hubungan antara *stockholders* dan manajemen disebut hubungan agensi. Hubungan seperti ini timbul ketika pemilik perusahaan (*principal*) mempekerjakan manajemen perusahaan (*agent*) untuk mewujudkan keinginannya. Konflik seperti ini disebut masalah agensi. Masalah keagenan (*agency problem*) muncul ketika pemilik kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Upaya untuk mengurangi masalah keagenan akan menimbulkan biaya keagenan (*monitoring cost, bonding cost dan residual cost*).

Salah satu cara untuk meminimalisasi konflik keagenan adalah dengan *corporate governance*, yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi hubungan antara dewan komisaris, manajemen perusahaan dan investor. Menurut

Shleifer dan Vishny (1997) *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan dan/atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau modal yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Untuk kepentingan pemilik itulah dewan komisaris dibentuk, dan salah satu cara yang dapat dilakukan pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik adalah dengan menerapkan GCG yang tepat.

Good Corporate Governance

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2000), GCG didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* dapat meminimalkan *agency cost*, dan *cost of capital*, serta meningkatkan nilai saham

perusahaan serta mengangkat citra perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa GCG suatu mekanisme yang diciptakan untuk mengendalikan perbedaan kepentingan yang terjadi sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara manajemen dan pemegang saham untuk mencapai suatu tujuan utama.

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu (Arifin, 2005). Menurut Savitri (2010) menyatakan bahwa mekanisme pengawasan GCG menjadi dua kelompok, yaitu mekanisme internal yang terdiri dari komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit, serta mekanisme eksternal yang terdiri dari kualitas audit, yang diukur melalui ukuran KAP yang mengaudit perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Shleifer dan Vishney (1997) menyebutkan bahwa pemilik institusional memiliki peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa

manajer untuk berfokus pada ekonomi, dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan diri sendiri. Pemilik institusional memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Dewan Komisaris Independen

Penelitian Wijayanti (2011) membuktikan bahwa adanya komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki komisaris independen, maka tindakan manipulasi akan dapat berkurang dan laporan keuangan yang disajikan lebih tepat waktu dan berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi kebijakan dan praktik penyampaian laporan keuangan serta melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen.

Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajer

tersebut, dapat diminimalkan dengan jalan mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mensejajarkan kepentingan tersebut yaitu dengan meningkatkan kepemilikan manajerial (Imanta & Satwiko, 2011).

Kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambil keputusan yang salah (Savitri, 2010). Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen akan ikut menentukan kebijakan dan keputusan yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola, sehingga mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja serta nilai perusahaan.

Komite Audit

Komite audit menurut KNKG (2006) adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan

komite audit. Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang memiliki tugas yaitu untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari GCG di perusahaan (Larasati, 2009).

Dalam menerapkan GCG peran komite audit pada perusahaan sangat penting (Chrisdianto, 2013). Menurut KNKG (2006), salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

Kualitas Audit

De Angelo (1981) dalam Savitri (2010) mendefinisikan *audit quality* sebagai probabilitas seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut. Upaya perusahaan dalam meningkatkan

kredibilitas dari laporan tersebut, ditunjukkan dengan penggunaan jasa KAP yang memiliki reputasi yang baik.

Penelitian Dye (1993) memberikan argumentasi bahwa auditor yang mempunyai kekayaan atau aset yang lebih besar mempunyai dorongan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dibandingkan dengan auditor dengan kekayaan yang lebih sedikit. Auditor yang memiliki kekayaan lebih besar (*deeper pockets*) adalah *audit size firms* yang besar.

Tax Avoidance

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (Suandy, 2008). *Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya

ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy, 2008).

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* antara lain: denda, publisitas dan reputasi. Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan (Bovi, 2005).

Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi di luar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Namun, bisa saja pemilik institusional percaya kepada dewan komisaris atas pengawasan dan pengelolaan perusahaan, karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi.

Kedua, kepemilikan institusional

berpikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan dan laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*

Coles dkk. (2008) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat.

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham.

Sehingga diharapkan dewan komisaris dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyaknya dewan komisaris akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam *voting* di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memiliki perusahaan, namun tidak mengelola perusahaan. Semakin tinggi persentase pemegang saham terbesar menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka (Timothy, 2010).

Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan

persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sebaliknya apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakan (Hartadinata, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Fadhilah (2014) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan. Beberapa alasan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yaitu: pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan

oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Waterhouse Cooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu,

KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four*. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₅: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tiga tahun berturut-turut, selama tahun 2014-2016.

2. Perusahaan perbankan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan untuk tahun 2014-2016.
3. Perusahaan perbankan tersebut mengalami laba untuk tahun 2014-2016.
4. Laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang Rupiah.
5. Perusahaan memiliki kelengkapan informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, selama periode penelitian tahun 2014-2016 terdapat sebanyak 39 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dikurangi dengan sebanyak 0 perusahaan yang mengalami delisting, 10 perusahaan tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan, dan sebanyak 5 perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2014-2016. Maka, diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan dalam satu periode, sehingga jumlah sampel selama tiga tahun periode adalah 72 sampel.

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2014-2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi

dengan mengumpulkan data sekunder yang dipublikasikan oleh BEI dan situs resmi perusahaan yang terpilih sebagai sampel.

Definisi Operasional

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara legal. Pengukuran terkait *tax avoidance* dilakukan dengan menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rates* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen dkk., 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional (INST) adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan. Kepemilikan sebagian saham oleh perusahaan ini dapat dijadikan sebagai kontrol dalam

pelaporan keuangan (Chen dkk. 2010). Rasio kepemilikan saham oleh perusahaan dapat diukur dengan:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Milik Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Dewan Komisaris

Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI. Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris. Rumus pengukuran komisaris independen adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (Boediono, 2005). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah persentase yang dimiliki oleh manajer dan dewan komisaris perusahaan (Erni, 2005).

$$KMNJ = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Modal saham perusahaan}}$$

Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu

bentuk nyata dari penerapan GCG atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan GCG. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula, dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen dkk., 2010). Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur.

$$KA = \text{Jumlah komite audit}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran KAP yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Variabel kualitas audit menggunakan variabel *dummy*. Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non *Big 4*, maka diberikan nilai 0.

Metode Analisis Data

Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kausal. Tahapan metode analisis

dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian regresi yang dibentuk untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

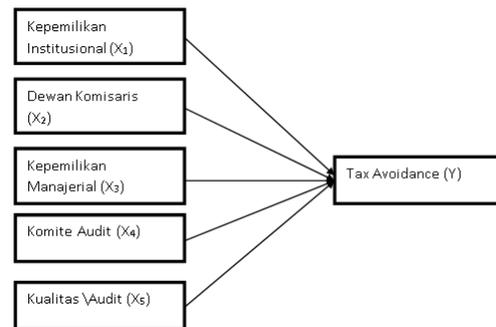
$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e_t$$

Keterangan:

- Y : *Tax Avoidance*
- X₁ : Kepemilikan Institusional
- X₂ : Dewan Komisaris
- X₃ : Kepemilikan Manajerial
- X₄ : Komite Audit
- X₅ : Kualitas Audit
- e_t : *Error term*

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah mekanisme GCG, yang meliputi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,

komite audit, kualitas audit. Kelima variabel independen tersebut, akan diuji pengaruhnya terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini. Gambaran model operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel penelitian (Ghozali, 2005). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	72	,52447	,06185	,58632	,2684291	,09978357
INST	72	,85994	,10336	,96330	,6868501	,18083396
KI	72	,40000	,40000	,80000	,5840002	,09292218
MANJ	72	,86691	,00000	,86691	,0253641	,10980706
KOMAU	72	4,00000	3,00000	7,00000	4,0277778	1,07431239
KUAUD	72	1,00000	,00000	1,00000	,7638889	,42767157
Valid N (listwise)	72					

Sumber: SPSS versi 23

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, variabel *Cash Effective Tax Rates* (CETR) menunjukkan Nilai rata-rata (deviasi standar) CETR adalah 0,2684 (0,0998). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki tax avoidance yang rendah karena nilai rata-rata lebih rendah dari nilai maksimum sebesar 0,58632. Nilai terendah dimiliki oleh PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) di tahun 2014 2014 sebesar 0,06185 dan tertinggi sebesar 0,58632 yang dipegang oleh Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) di tahun 2015.

Dari 24 perusahaan yang diamati, kepemilikan institusional menghasilkan nilai minimum dan maksimum kepemilikan institusional sebesar 0,10336 dan 0,96330. Nilai minimum dimiliki oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) di tahun 2013, sementara nilai maksimum dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) di tahun 2015.

Komisaris independen memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,4 dan 0,8. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) memiliki nilai minimum untuk komisaris independen selama dua tahun berturut-turut di tahun 2015 dan 2016. Sementara Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR) memperoleh nilai maksimum di tahun 2016.

Nilai minimum dan maksimum yang diperoleh kepemilikan manajerial sebesar 0 dan 0,86691. Menunjukkan bahwa besar kepemilikan manajerial sektor perbankan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0 hingga 0,86691. Nilai rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 0,0253641 pada standar deviasi 0,10980706.

Nilai minimum dan maksimum yang diperoleh komite audit sebesar 3 dan 7. Menunjukkan bahwa besar komite audit sektor perbankan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 3 hingga 7. Nilai rata-rata komite audit sebesar 4,0277778 pada standar deviasi 1,07431239.

Nilai minimum dan maksimum yang diperoleh kualitas audit sebesar 0 dan 1. Menunjukkan bahwa besar kualitas audit sektor perbankan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rata-rata kualitas audit sebesar 0,7638889 pada standar deviasi 0,42767157.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Model regresi dikatakan mematuhi asumsi normalitas apabila nilai

Kolmogorov Smirnov tidak signifikan atau lebih besar dari 0,05. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		72
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.09687296
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.104
	<i>Positive</i>	.104
	<i>Negative</i>	-.060
<i>Test Statistic</i>		.104
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.053

Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan besarnya *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah $0,053 > 0,05$. Sehingga asumsi normalitas dapat dinyatakan terpenuhi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik,

seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini mengikuti salah satu cara menurut Ghazali (2009) yaitu dengan melihat nilai tolerance dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
1 (<i>Constant</i>)			
Kepemilikan Instiusional	,917	1,090	Tidak terjadi multikolinearitas
Komisaris Independen	,931	1,075	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepemilikan Manajerial	,981	1,019	Tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audit	,852	1,174	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Audit	,853	1,173	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: SPSS versi 23

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pada periode t-1. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan Uji *Runs Test*. Berdasarkan hasil uji *runs test*

diperoleh nilai *run test* sebesar 1,000. Hal ini berarti tidak ada atau tidak terjadi masalah autokorelasi pada penelitian ini

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, yaitu *variance* residual tetap (Ghozali, 2009). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Understandardized residual		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6,636	2,159		-3,073	,003
Kepemilikan Manajerial	-1,960	1,349	-,180	-1,454	,151
Komisaris Independen	2,770	2,606	,130	1,063	,292
Kepemilikan Manajerial	1,436	2,148	,080	,668	,506
Komite Audit	,132	,236	,072	,561	,577
Kualitas Audit	-,215	,591	-,047	-,364	,717

Sumber: SPSS versi 23

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *park* dari tabel 4. menunjukkan nilai *sig* variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit masing-

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu kepemilikan

masing sebesar 0,151; 0,292; 0,506; 0,577; 0,717. Semua nilai *sig* > dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Tabel 5. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Model	Understandardized residual		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,277	,110		2,511	,014

Kepemilikan Manajerial	-,041	,069	,074	,593	,555
Komisaris Independen	-,117	,133	-,109	,881	,382
Kepemilikan Manajerial	-,020	,110	-,022	,185	,854
Komite Audit	-,001	,012	-,006	2,048	,002
Kualitas Audit	,046	,030	,195	3,511	,036

Sumber: SPSS versi 23

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$TA = 0,277 - 0,041X1 - 0,117X2 - 0,020X3 - 0,001X4 + 0,046X5 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta positif sebesar 0,277 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit konstan (0) maka akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,277.
2. Nilai parameter atau koefisien regresi b1 menunjukkan bahwa setiap variabel kepemilikan institusional bertambah 1 kali, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,041 kali dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.
3. Nilai parameter atau koefisien regresi b2 menunjukkan bahwa setiap variabel komisaris independen bertambah 1 kali, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,117

kali dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.

4. Nilai parameter atau koefisien regresi b3 menunjukkan bahwa setiap variabel kepemilikan manajerial bertambah 1 kali, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,020 kali dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.
5. Nilai parameter atau koefisien regresi b4 menunjukkan bahwa setiap variabel komite audit bertambah satu kali, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,001 kali dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.
6. Nilai parameter atau koefisien regresi b5 menunjukkan bahwa setiap variabel kualitas audit bertambah 1 kali, maka penghindaran pajak akan bertambah sebesar 0,046 kali dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap.

Hasil Uji t (Parsial)

Uji t berada pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	2,511	,014
	Kepemilikan Manajerial	,593	,555
	Komisaris Independen	,881	,382
	Kepemilikan Manajerial	,185	,854
	Komite Audit	2,048	,002
	Kualitas Audit	3,511	,036
		$R^2 = 0,19$	
		<i>Adjusted R</i> ² = 0,136	

Sumber: SPSS versi 23

Berdasarkan tabel di atas, dilakukan pembahasan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai t hitung sebesar 0,593 lebih kecil dari t-tabel 1,998 dengan nilai signifikan sebesar $0,555 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan H_1 ditolak
2. Variabel komisaris independen memiliki nilai t hitung sebesar 0,881 lebih kecil dari t-tabel 1,998 dengan nilai signifikan sebesar $0,382 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan H_2 ditolak.
3. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai t hitung sebesar 0,185 lebih kecil dari t-tabel 1,998 dengan nilai signifikan sebesar $0,854 > 0,05$. Maka, H_3 ditolak.
4. Variabel komite audit memiliki nilai t hitung sebesar 2,048 lebih besar dari t-tabel 1,998 dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$. Maka, H_4 terdukung.
5. Variabel kualitas audit memiliki nilai t hitung sebesar 3,511 lebih besar dari t-tabel 1,998 dengan nilai signifikan sebesar $0,036 < 0,05$. Maka, H_5 terdukung.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan

tabel 6 menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,136, artinya kemampuan variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit terhadap variasi variabel penghindaran pajak sebesar 13,6%, sedangkan sisanya 86,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional di penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti, banyaknya kepemilikan institusional tidak dapat mengontrol pengambilan keputusan dan meningkatkan GCG perusahaan. Hal ini terjadi karena hanya 7 dari 24 bank yang diteliti yang kepemilikan institusionalnya diatas 80%, sementara sisanya sebesar 17 bank berkisar antara 20%-70% kepemilikan institusionalnya. Selain itu, meski perusahaan memiliki institusional yang tinggi, biasanya pemilik menyerahkan ke komisaris untuk pengawasan dan pengelolaan perusahaan.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan kepemilikan institusional tidak berdampak pada kenaikan atau

penurunan *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan di BEI. Sejalan dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan Astrian dkk. (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Pranata dkk (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan data yang dikumpulkan sebanyak 24 bank sudah memiliki komisaris independen paling tidak setengah dari total komisaris, namun komisaris independen yang dimiliki belum tentu kompeten dalam bidang keuangan. Maka kesimpulannya adalah kenaikan atau penurunan nilai komisaris independen tidak berdampak pada kenaikan atau penurunan *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan di BEI. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan tidak ada pengaruh dewan komisaris independen

terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2013). yang menyebutkan ada pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*.

Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan manajerial pada penelitian ini terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari 24 bank yang diteliti, 6 bank (AGRO, BBNP, BMAS, PNB, MEGA dan NOBU) pihak manajemennya sama sekali tidak memiliki saham atas perusahaan. Kemudian ada 4 bank (BMRI, BNGA, BJBR, dan BJTM) kepemilikan manajerialnya tidak tetap selama 3 tahun berturut-turut. Ada di tahun tertentu memiliki persentasi, ada juga yang tidak sama sekali. Sisanya, manajemen memiliki saham namun jumlahnya tidak signifikan karena sebagian saham perusahaan dimiliki publik juga.

Hasil dari uji t, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hal tersebut dengan kenaikan atau penurunan nilai kepemilikan manajerial tidak berdampak pada

kenaikan atau penurunan *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan di BEI. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mahulae, Pratomo dan Nurbaiti (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Pohan (2009) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit dalam penelitian ini terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti adanya komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat melaksanakan pengawasan independen terhadap laporan keuangan dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung dengan bukti bahwa 24 bank yang diteliti memiliki komite audit yang jumlahnya 3 sampai 7 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan nilai komite audit akan berdampak pada kenaikan atau penurunan *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan di BEI. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tommi dan Maria

(2013) yang menyatakan bahwa komite audit mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014). Menurutnya, komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit pada penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* hasil auditnya bagus. Namun arah positif dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa KAP yang memiliki reputasi bagus pun juga dapat mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* dikarenakan tingkat intelektual yang tinggi juga dari KAP. Berdasarkan hasil penelitian dari 24 bank, ada 5 bank (BACA, BBMD, BBNP, BSIM dan NOBU) yang diaudit oleh KAP non *Big Four* (Crowe Howarth, KAP Leonard, Mulia dan Richard, BKR International, Moore Stephen, RSM AAJ). Sementara untuk BJTM, pada tahun 2015 dan 2016 diaudit oleh Kreston. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan nilai kualitas audit akan berdampak pada kenaikan atau penurunan *tax*

avoidance perusahaan sektor perbankan di BEI.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Annisa dan Kurniasih (2012) dan juga Dewi dan Jati (2014). yang menyatakan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Fadhilah (2014) yang menyatakan adanya pengaruh negatif dari kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dan kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sementara kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai perusahaan.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya dilakukan pada perusahaan sektor

perbankan, tidak meliputi perusahaan di sektor lain yang terdaftar di BEI, variabel penelitian ini hanya menggunakan lima variabel yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* perusahaan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ditemukan selama penelitian, maka terdapat saran bagi peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian, menggunakan tahun periode, dan menambahkan indikator faktor internal keuangan lainnya sehingga dapat mengetahui faktor-faktor utama yang memengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., & Kurniasih L. (2012). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8, 2, 95-189.
- Arifin, Z. (2005). *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Astrian., Puspa, D. F., & Ethika. (2013). Pengaruh *Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2013. *E-Journal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*. Jakarta.
- Boediono, G, SB. (2005). *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Solo: Simposium Nasional Akuntansi VIII.
- Bovi, M. (2005). Book-Tax Gap, An Income Horse Race. *Working Paper*.
- Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. New York: Springer.
- Bursa Efek Jakarta. (2000). *Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kep- 315/BEJ/06/2000*. Jakarta: BEJ.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms?. *Journal of Financial Economics*, 95, 41–61.
- Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2008). Boards: Does One Size Fit All? *Journal of Financial Economics*, 87, 2, 329-356.
- Chrisdianto, B. (2013). Peran Komite Audit dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Aktual* Vol 2, No. 1.
- Dewi, N. K. & Jati, IK. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 6, 2.
- Dye. (1993). *Auditing Standards, Legal Liability, and Auditor Wealth*. *Journal of Political Economics* , 101, 887-914.
- Erni, M. (2005). Analisis Dampak Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.

- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi. Padang: Universitas Negeri Padang*.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dalam Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hartadinata, O. S. (2013). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Aggressiveness* Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2008-2010. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Imanta, D., & Satwiko, R. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 13, 1, 67-80.
- International Finance Corporation. (2014). *The Indonesian Corporate Governance Manual (1st ed.)*. Jakarta: Author.
- Larasati, A. (2009). Analisis Pengaruh *Mekanisme Corporate Governance*, Kualitas Laba, dan nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Universitas Airlangga Surabaya.
- Maharani, I G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D. & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Proceeding of Management*, 3, 2.
- Menteri Keuangan. (2016). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 118/PMK.03/2016. Jakarta.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram*.
- Pranata, F. M., Puspa, D. F., & Herawati. (2013). Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Abstract of Undergraduates Research: Faculty of Economics, Bung Hatta University*.
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio *Tobin Q*, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4, 113-115.
- Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2012). *Corporate Finance*. New York: Mc Graw-Hill.
- Savitri, R. (2010). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Doctorl Dissertasion, Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Shleifer, A. & Vishny, Robert W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, 52 (2), 737-783.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (4th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness. *Journal Hongkong Baptis University*.
- Tommi & Maria. (2013). Pengaruh *Return on Assets, Leverage,*

Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 1.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). Pengampunan Pajak. Jakarta.

Wijayanti, F. T., Sutaryo, & Prabowo, M. A. (2011). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh.